

Ribuan Temuan BPK Tidak Ditindaklanjuti



Abdu Syukri/Equator

KEPALA BPK Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo memberikan pemaparan tentang fungsi dan tugas BPK, Senin (21/2) di Hotel Mercure Pontianak.

PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar mencatat selama 2004 hingga semester II 2010 terdapat 2144 temuan dan 4313 rekomendasi dalam proses penggunaan keuangan seluruh pemerintah daerah se-Kalbar. Sayangnya, temuan dan reko-

mendasi itu belum semuanya ditindaklanjuti.

“Dari seluruh temuan itu, baru sekitar 50 persen yang sudah ditindaklanjuti,” kata Ir Adi Sudibyo MM, Kepala BPK Perwakilan Kalbar kepada sejumlah wartawan usai kegiatan ramah tamah dengan pers di Hotel

Mercure, Pontianak, Senin pagi (21/2).

Tidak disebutkan angka pasti berapa jumlah temuan dan rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti etinitas (sasaran audit tersebut). Namun jumlahnya dipastikan lebih dari 1000 untuk temuan dan 2000 untuk rekomendasi.

“Besok (hari ini, red) kita akan mengadakan pertemuan dengan para kepala daerah dan inspektorat di masing-masing daerah se-Kalbar. Kita akan membahas mekanisme tindak lanjut temuan dan rekomendasi ini bersama tim dari BPK Pusat dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, red),” tutur Adi.

Adi berharap pada tahun 2011

■ Halaman 7

Ribuan Temuan

ini temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti tersebut sudah mulai dilakukan tindak lanjut oleh Pemda-Pemda yang ada. Jika tidak, BPK akan melakukan langkah selanjutnya. Jika tidak ditindaklanjuti, kita akan serahkan ke aparat penegak hukum. Ini perintah Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK), ancamnya.

Berdasarkan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (TLHP) yang diumumkan BPK Perwakilan Kalbar beberapa waktu lalu, dari jumlah 4313 rekomendasi yang diberikan, sebanyak 2041 atau

hanya 47 persen rekomendasi yang telah sesuai dengan tindak lanjut.

Sebanyak 1299 atau 30 persen rekomendasi belum sesuai dengan tindak lanjut. Bahkan 967 atau 23 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti sedikit pun oleh pihak-pihak yang diaudit. Dari 14 kabupaten/kota plus pemerintah provinsi, BPK mencatat tiga pemerintah daerah yang menempati urutan teratas melaksanakan tindak lanjut. Mereka adalah Pemkab Sambas dengan ranking 83%, Pemkab Landak 74% dan Pemkot Singkawang 73%. Yang terendah adalah Kabupaten Melawi, pungkas Adi.

.... dari halaman 1

Terkait soal rencana audit keuangan tahun 2011, Kepala Sub Auditoral Kalbar I BPK Perwakilan Kalbar, Hernold F Makawimbang menjelaskan, pada tahun ini audit yang dilakukan akan difokuskan pada dua tema. Pada semester kedua nanti, kita akan memfokuskan audit aset dan infrastruktur, kata Hernold.

Audit terfokus itu tidak berlaku umum di seluruh daerah se-Kalbar. Audit tersebut hanya akan dilakukan di empat etinitas. Tahun lalu kita lakukan di Kapuas Hulu, KKR, Sambas, Sanggau dan Provinsi. Tahun ini hanya di empat etinitas saja. Tapi provinsi masih akan dilakukan, tandas Hernold. (bdu)